

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan besar yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan akibat dari kemiskinan bisa berimbas pada segala aspek kehidupan masyarakat seperti pengangguran, kriminalitas, rendahnya pendidikan, kesehatan, buruknya sanitasi dan lingkungan, dan lain-lain. Pengangguran merupakan dampak dari kemiskinan yang berhubungan erat dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang sulit diraih masyarakat miskin akibat putus sekolah. Putus sekolah dan hilangnya kesempatan pendidikan akan menjadi penghambat rakyat miskin dalam menambah keterampilan, menjangkau cita-cita dan mimpi mereka. Ini menyebabkan kemiskinan yang dalam karena hilangnya kesempatan untuk bersaing dengan global dan hilangnya kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak. Dikarenakan sulit untuk bekerja, maka tidak adanya pendapatan membuat pemenuhan kebutuhan sulit, kekurangan nutrisi dan kesehatan, dan tak dapat memenuhi kebutuhan penting lainnya yang berdampak pada kualitas kesehatan. Kesulitan mencari nafkah tersebut mengakibatkan orang lupa diri sehingga mencari jalan cepat tanpa memedulikan halal atau haramnya uang sebagai alat tukar guna memenuhi kebutuhan. Misalnya saja perampokan, penodongan, pencurian, penipuan, pembegalan, penjambretan dan lain-lain. Selain itu, buruknya generasi penerus adalah dampak yang berbahaya akibat kemiskinan. Jika anak-anak putus sekolah dan bekerja karena terpaksa, maka akan ada gangguan pada tumbuh kembang anak seperti gangguan pada perkembangan mental, fisik dan cara berfikir mereka.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang juga tak terlepas dari masalah kemiskinan tersebut. Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada bulan Maret 2015 dibandingkan September 2014 naik sebesar 0,06 poin persen dari 12,28 persen pada September 2014 menjadi 12,34 persen pada Maret 2015. Peningkatan selama satu semester tersebut ditunjukkan dengan jumlah penduduk miskin pada September 2014 sebanyak 4.748,42 ribu jiwa menjadi sebanyak

4.789,12 ribu jiwa pada Maret 2015 atau naik sebesar 40,70 ribu jiwa. Data peningkatan penduduk miskin di Jawa Timur tersebut bisa dilihat pada tabel I berikut.

Tabel 1.1. :
Kondisi Kemiskinan di Jawa Timur
(2011 – 2015)

Keterangan	2011	2012	2013	2014	(Maret) 2015
Persentase Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk					
Jawa Timur	13,85	13,08	12,73	12,28	12,34
Nasional	12,36	11,66	11,46	10,96	11,22
Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan					
Jawa Timur	86,15	86,92	87,27	87,72	87,66
Nasional	87,51	88,34	88,53	89,04	88,78
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)					
Jawa Timur	5.251,45	4.992,75	4.893,01	4.748,42	4.789,12
Nasional	30.018,93	28.594,60	28.553,93	27.727,78	28.592,83

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Susenas Maret 2015

Berdasarkan hasil Susenas, pada periode September 2014 - Maret 2015, garis kemiskinan di Jawa Timur meningkat sebesar 5,25 persen atau Rp. 15.226 per kapita perbulan, yaitu dari Rp. 289.945 perkapita perbulan pada September 2014 menjadi Rp.305.171 per kapita perbulan pada Maret 2015.

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibanding peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada bulan Maret 2015, kontribusi garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 73,28 persen. Garis kemiskinan merupakan harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/ hari dan kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya. Data tersebut bisa dilihat pada tabel II berikut ini :

Tabel 1.2
Garis Kemiskinan di Jawa Timur
(2011 – 2015)

Uraian	2011	2012	2013	2014	(Maret) 2015
Makanan	167.360	179.244	201.683	213.043	23.641
Bukan Makanan	60.243	64.540	72.075	76.902	81.530
Total	227.602	243.783	273.758	289.945	305.171

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Susenas Maret 2015

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan yang digambarkan oleh angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas kemiskinan, di mana semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. Sedangkan angka Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Semakin tinggi angka indeks ini maka sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu semakin timpang dan sebaliknya.

Nilai P1 di Jawa Timur menunjukkan peningkatan 0,206 poin atau sebesar 1,857 pada September 2014 menjadi 2,063 pada Maret 2015. Peningkatan nilai P1 tersebut terjadi di perkotaan (0,034 poin), serta di perdesaan mengalami peningkatan (0,372 poin). Sementara itu, nilai P2 juga mengalami peningkatan 0,071 poin atau menjadi 0,525 pada Maret 2015. Peningkatan kedua nilai yaitu P1 dan P2 memberikan indikasi rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga semakin melebar. Data tentang kondisi P1 dan P2 bisa dilihat pada tabel III berikut ini.

Tabel 1.3
Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan
di Jawa Timur

Uraian	2011	2012	2013	2014	(Maret) 2015
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,996	1,935	2,071	1,857	2,063
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)	0,461	0,439	0,503	0,454	0,525

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Susenas Maret 2015

Kenaikan harga BBM, tingginya angka inflasi, dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar memicu munculnya penduduk yang rentan miskin. Akibat adanya kenaikan BBM, tingginya inflasi, dan merosotnya nilai tukar rupiah otomatis menyebabkan semua harga komoditi pangan yang menjadi kebutuhan pokok menjadi naik drastis. Penduduk yang semula berada diatas garis kemiskinan akan rentan menjadi miskin dikarenakan biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup semakin jauh melambung.

Kenaikan harga BBM jenis premium dan solar yang cukup tinggi sebesar masing – masing 44% pada tahun 2013 serta sebesar 31% dan 36% pada tahun 2014 menambah beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Data tersebut bisa dilihat pada tabel IV berikut.

Tabel 1.4
Kenaikan Harga BBM di Indonesia
(2011 – 2015)

Berlaku		Bensin Premium	Solar	Minyak Tanah
Tahun	Tanggal	(%)	(%)	(%)
2015	19 januari		Turun 15%	-
	1 Januari	Turun 11.8%	Turun 3.4%	-
2014	18 November	Naik 31%	Naik 36%	-
2013	22 Juni	Naik 44%	Naik 44%	-
2009	15 Januari	Naik 10%	Naik 6%	-
	15 Desember	Turun 9%	Turun 13%	-
2008	15 Desember	Turun 9%	Turun 13%	
	1 Desember	Turun 9%		
	24 Mei	Naik 33%	Naik 28%	Naik 25%
2005	1 Oktober	Naik 88%	Naik 105%	Turun 9%
	1 Maret	Naik 33%	Naik 27%	Naik 22%
2003	21 Januari	-	Turun 13%	Turun 9%
	1 Januari	Naik 17%	Naik 64%	

Naiknya inflasi yang sangat tinggi pada tahun 2013 dan 2014 di angka 8.38 dan 8.36 menjadi salah satu penyebab bertambahnya jumlah penduduk rentan miskin. Data fluktuasi kenaikan inflasi di Indonesia bisa dilihat pada tabel V berikut.

Tabel 1.5 :
Laju Inflasi di Indonesia
(2006 – 2014)

Bulan	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jan	1,36	1,04	1,77	-0,07	0,84	0,89	0,76	1,03	1,07
Pebr	1,95	1,67	2,44	0,14	1,14	1,03	0,81	1,79	1,33
Maret	1,98	1,91	3,41	0,36	0,99	0,7	0,88	2,43	1,41
April	2,03	1,74	4,01	0,05	1,15	0,39	1,09	2,32	1,39
Mei	2,41	1,84	5,47	0,1	1,44	0,51	1,15	2,3	1,56
Juni	2,87	2,08	7,37	0,21	2,42	1,06	1,79	3,35	1,99
Juli	3,33	2,81	8,85	0,66	4,02	1,74	2,5	6,75	2,94
Agust	3,67	3,58	9,4	1,22	4,82	2,69	3,48	7,94	3,42
Sept	4,06	4,41	10,47	2,28	5,28	2,97	3,49	7,57	3,71
Okt	4,96	5,24	10,96	2,48	5,35	2,85	3,66	7,66	4,19
Nov	5,32	5,43	11,1	2,45	5,98	3,2	3,73	7,79	5,75
Des	6,6	6,59	11,06	2,78	6,96	3,79	4,3	8,38	8,36

Sumber : Diolah dari Hasil Survei Harga Konsumen, BPS
Data dikutip dari publikasi Statistik Indonesia

Hal ini semakin diperparah lagi dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar. Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar yang cukup tajam pada tahun 2013 (kurs U\$ = Rp. 12.250,00), tahun 2014 (kurs U\$ = Rp. 12.550,00), hingga pada tahun 2015 (kurs U\$ = Rp. 13.500,00) membuat beban hidup masyarakat golongan menengah ke bawah semakin berat.

Tabel 1.6
Nilai Tukar Rupiah Terhadap U\$ Amerika
(2001 – 2015)

Tahun	Nilai Tukar
2001	10.265,00
2002	9.260,00
2003	8.570,00
2004	8.985,00
2005	9.705,00
2006	9.200,00
2007	9.125,00
2008	9.666,00
2009	9.447,00
2010	9.036,00
2011	9.113,00
2012	9.718,00
2013	12.250,00
2014	12.550,00
2015	13.500,00

Sumber : bank Indonesia

Penduduk dengan pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan disebut sebagai penduduk miskin. Sementara itu, penduduk rentan miskin merujuk pada mereka yang tidak termasuk miskin tapi sangat rentan untuk jatuh miskin. Kelompok *rentan miskin* ini mudah terpengaruh terhadap berbagai perubahan sosial di sekitarnya. Mereka seringkali berpindah dari status “rentan” menjadi “miskin” dan bahkan “sangat miskin” misalnya bila terjadi kenaikan BBM, inflasi, dan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.

Upaya pengentasan keluarga rentan miskin dilakukan salah satunya melalui lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan / Desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. LPM merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 229 menjelaskan tugas Lurah dalam membantu Camat selain tugas pemerintahan dan pelayanan, melakukan pemberdayaan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 disebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat, yang memiliki tugas membantu lurah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi lembaga kemasyarakatan kelurahan antara lain (i) penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, (ii) penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, (iii) Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan pada masyarakat, (iv) Penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan secara partisipatif, (v) penggerak prakarsa swadaya gotong-royong masyarakat, (vi) pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup, (vii) pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang di remaja, (viii) pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, (ix) pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat, (x) pendukung komunikasi informasi, sosialisasi antar pemerintah dan masyarakat.

Sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, LPM memiliki peranan yang cukup besar di tengah-tengah masyarakat, sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, dan sebagai mediator penghubung antara masyarakat dan pemerintah.

Peran LPM yang sangat strategis dalam upaya pengentasan keluarga rentan miskin inilah, maka diperlukan peningkatan kelembagaan LPM agar bisa megoptimalkan peran dan fungsinya di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui bagaimanakan peranan LPM dalam meningkatkan pendapatan keluarga rentan miskin di provinsi Jawa Timur saat ini. Selain itu perlu pula diidentifikasi hambatan dalam pengembangan lembaga pemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan sebagai acuan membuat model pengembangan lembaga LPM.

1.2. Rumusan Masalah

Memegang peran strategis pada proses pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, maka diperlukan pengembangan lembaga LPM dalam rangka pengentasan keluarga rentan miskin. Dari latar belakang masalah tersebut, maka dalam kajian ini yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana kondisi pendapatan keluarga rentan miskin di Provinsi Jawa Timur saat ini ?
2. Bagaimana peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan keluarga rentan miskin di provinsi Jawa Timur saat ini ?
3. Apa saja hambatan dalam pengembangan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan keluarga rentan miskin di provinsi Jawa Timur saat ini ?
4. Bagaimana model pengembangan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan keluarga rentan miskin di provinsi Jawa Timur saat ini ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi pendapatan pendapatan keluarga rentan miskin di Provinsi Jawa Timur saat ini.
2. Mendidentifikasi peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan keluarga rentan miskin di provinsi Jawa Timur saat ini.
3. Mengidentifikasi hambatan dalam pengembangan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan keluarga rentan miskin di provinsi Jawa Timur.
4. Merumuskan model pengembangan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan keluarga rentan miskin di provinsi Jawa Timur.

1.4. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Membangun model pengembangan lembaga pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan keluarga rentan miskin
2. Meningkatnya pendapatan keluarga rentan miskin

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam kajian ini adalah :

1. Kondisi pendapatan keluarga rentan miskin
2. Peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan keluarga rentan miskin
3. Model pengembangan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan keluarga rentan miskin